

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dan Sebab-Sebab Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

⁶ Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.⁷

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hal : 71.

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal : 11.

- a) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- b) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama **Cicero** mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.⁸

Secara *yuridis formal*, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas

⁸ A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, hal 2.

tercantum: *kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP*. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁹

Sarjana Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut;

- a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya:
 - 1) Orang yang sakit jiwa
 - 2) Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacad badani rohani, dan kemunduran jiwa raganya:
 - 1) Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum.
 - 2) Orang-orang dengan gangguan badani-rohani pada usia lanjut (dementia senilitas), cacad/invalid oleh suatu kecelakaan, dll.

⁹ Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI, 1988, Hal : 40-42.

c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:

- 1) Penjahat kebiasaan
- 2) Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.
- 3) Penjahat kebetulan.
- 4) Penjahat-penjahat berkelompok.

Seelig membagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku, atau atas dasar konstitusi jiwa/psikis pelakunya, yaitu:

1. Penjahat yang didorong oleh sentiment-sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang naïf primitive. Misalnya membunuh anak isteri karena membayangkan mereka akan sengsara di dunia yang kotor ini, sehingga lebih baik mereka mati.
2. Penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh satu ideology dan keyakinan kuat, baik yang fanatic kanan (golongan agama), maupun yang fanatic kiri (golongan sosialis dan komunis. Misalnya gerakan “jihad”.

Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- a) Kejahatan ekonomi
- b) Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan
- c) Kejahatan kesusilaan
- d) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda

Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dilakukan oleh Cecaro Lombroso, ialah sebagai berikut:

1. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (*born criminals*) dengan kelainan-kelainan bentuk-bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang

abnormal, stigmata atau noda fisik, anomaly/cacad dan kekurangan jasmaniah.

2. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya: gila, setengah gila, idiot, debil, imbesil, dihindangi hysteria, dll.
3. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksualitas atau nafsu-nafsu seks.
4. Penjahat karena kesempatan.
5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan buruk.

Aschaffenburg membagi tipe penjahat sebagai berikut:

- a) Penjahat professional
- b) Penjahat oleh kebiasaan
- c) Penjahat tanpa/ kurang memiliki disiplin kemasyarakatan.
- d) Penjahat-penjahat yang mengalami krisis jiwa.
- e) Penjahat yang melakukan kejahatan oleh dorongan-dorongan seks yang abnormal.
- f) Penjahat yang sangat agresif dan memiliki mental sangat labil, yang sering melakukan penyerangan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- g) Penjahat karena kelemahan batin dan dikejar-kejar oleh nafsu materiil yang berlebih-lebihan.
- h) Penjahat dengan indolensi psikis dan segan bekerja keras.
- i) Penjahat campuran (kombinasi dari motif-motif 1 sampai 8)¹⁰

¹⁰ Muhammad Mustafa. 2007. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI PRESS. hal :16

2. Pengertian Begal

Sedangkan menurut England and West of Theft Act, seseorang dinyatakan melakukan pembegalan ketika ia melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, demi membuat korban tersebut takut. Menurut Louise E. Porter, pembegalan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula untuk barang personal. Nah, menurut Porter, pelaku begal yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih 'kejam' atau *hostile*.

Kriminolog Profesor Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa. Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang membawa harta benda ditempat sepi tersebut. Kata begal dalam bahasa Banyumas memiliki arti rampok atau perampok. Dan begalan berarti perampasan atau perampokan di tengah jalan.

Istilah 'begal' adalah kata dasar (lingga) dalam Bahasa Jawa, yang telah digunakan dalam Bahasa Jawa Kuna. Secara harafiah, kata jadian *ambegal* dan *binegal* berarti menyamun, merampok (di jalan). Kata *pambegalan* menunjuk kepada tempat yang baik untuk menyamun. Pada susastra lama, perkataan ini antara lain dijumpai dalam kitab *Slokantara* (68.14), *Korawasrama* (54), *Tantri Kamandaka* (136) dan *Calon Arang* (136). Istilah 'begal' diserap ke dalam bahasa Indonesia, dalam arti penyamun. Kata membegal berarti merampas di jalan, menyamun. Adapun pembegalan berkenaan dengan proses, cara atau perbuatan membegal, perampasan di jalan.

Pembegalan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang terhadap seorang atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan dengan merampas harta benda miliknya disertai atau tanpa disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang memakan korban jiwa.

Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan orang banyak atau khalayak banyak. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Se jauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat.¹¹

3. Pengertian Tentang Senjata Tajam

Pengertian Senjata Tajam Senjata adalah suatu alat yang di gunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia dapat di katakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. senjata tajam adalah senjata yang di tajamkan untuk di gunakan sebagai alat untuk melukai sesuatu.¹²

¹¹ A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, hal 4.

¹² Ahsan Ridwan, *Definisi Senjata Tajam Adalah Alat Yang*, <http://zhsan123.blogspot.co.id>, akses tanggal 22 Oktober 2016.

Membawa celurit untuk berjaga-jaga dalam perjalanan, adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12/1951 atas dugaan membawa senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Si pelaku tetap melanggar pasal tersebut sekalipun menyimpan atau menyembunyikan celuritnya di dalam tas. Perbuatan tersebut adalah kejahatan (lihat Pasal 3 UU Drt. No. 12/1951).¹³

B. Jenis Kejahatan

1. Bentuk-Bentuk Perilaku Kejahatan

Menurut KUHP, penjelmaan atau bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagi-bagikan dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a) Rampok dan gangsterisme, yang sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi legal.
- b) Penipuan-penipuan
- c) Pencurian dan pelanggaran

Kemudian, menurut cara kejahatan dilakukan bisa dikelompokkan dalam:

1. Menggunakan alat-alat bantu: senjata, senapan, bahan-bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dan lain-lain.
2. Tanpa menggunakan alat bantu, hanya dengan kekuatan fisik belaka, bujuk rayu, dan tipu daya.
3. Residivis, yaitu penjahat yang berulang-ulang ke luar masuk penjara.
4. Penjahat-penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak kejahatan dengan pertimbangan-pertimbangan dan persiapan yang matang.
5. Penjahat kesempatan atau situasional.

¹³Hukum Online, *Hukum Membawa Senjata Tajam Untuk Berjaga-Jaga*, <http://www.hukumonline.com>, akses tanggal 22 Oktober 2016

6. Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika.
7. Penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri, tidak disengaja, lalai, ceroboh, acuh tak acuh, sembrono, dll.¹⁴

C. Teori – teori Kriminologi Tentang Kejahatan

1. Teori Paradigma Studi Kejahatan

Dalam Teori ini oleh pakar yang bernama Simecca dan Lee menengahkan tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan disatu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan yaitu : perspektif consensus, pluralist, dan perspektif conflict atau dipandang sebagai suatu keseimbangan yang bergerak dari konservatif menuju keliberal dan terakhir menuju kepada perspektif radikal. Sementara itu, ketiga paradigma dimaksud adalah paradigma positivis, interaksionis, dan paradigma sosialis. Ketiga paradigma tersebut berkaitan satu sama lain yang membentuk suatu skematis¹⁵ :

Teori Paradigma

PERSPEKTIF	KONSENSUS (Conservative)	PLURALIS (Liberal)	KONFLIK (Radikal)
PARADIGMA	POSITIVIS	INTERAKSIONIS	SOSIALIS

Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif consensus adalah

1. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat banyak.

¹⁴ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*. Bogor. Politei. Hal 253-254

¹⁵ Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Penerbit PT Eresco. Hal 42.

2. Hukum melayani semua orang tanpa kecuali atau secara negative dapat dikatakan bahwa hukum tidak membeda-bedakan seseorang atas dasar ras, agama, dan suku bangsa.
3. Mereka yang melanggar hukum yang mencerminkan keunikan-keunikan atau merupakan kelompok yang unik.

Prinsip-prinsip dari paradigm yaitu:

1. Tingkah laku manusia merupakan hasil dari hukum sebab akibat.
2. Hubungan sebab-akibat tersebut dapat diungkapkan melalui metoda-metoda yang bersifat ilmiah.
3. Penjahat mewakili suatu hubungan sebab-akibat yang unik.
4. Jika hubungan sebab akibat ini dapat diketahui (melalui metode ilmiah) maka tingkah laku criminal dapat diprediksi dan dapat diawasi dan penjahat itu dapat dibina.

Prinsip yang dianut oleh model pluralis adalah sebagai berikut :

- a) Masyarakat terdiri dari perbagai macam kelompok
- b) Dalam kelompok - kelompok ini terjadilah perbedaan, bahkan pertentangan mengenai apa yang disebut benar dan salah.
- c) Terdapat kesepakatan tentang mekanisme penyelesaian sengketa .
- d) System hukum memiliki sifat bebas nilai.
- e) System hukum berpihak pada kesejahteraan terbesar masyarakat.

Prinsip yang dianut oleh paradigma interaksionis adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan bukanlah terletak pada tingkah lakunya, melainkan pada reaksi yang muncul terhadapnya.
2. Reaksi terhadap penjahat akan menghasilkan cap sebagai penjahat.
3. Seseorang yang dicap sebagai penjahat dengan sendirinya akan termasuk kelompok penjahat.
4. Seseorang siberi cap sebagai penjahat melalui suatu proses interaksi.
5. Terdapat kecenderungan bagi seseorang yang dicap sebagai penjahat akan mengidentifikasikan dirinya sebagai penjahat.¹⁶

2. Teori Kriminologi Tentang Kejahatan dengan Kekerasan

Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu :

1. Macrotheories

Menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur social dan dampaknya, yang menitikberatkan pada “rates of crime” atau epidemiologi kejahatan dari pada atas pelaku kejahatan.

2. Microtheories

Menjelaskan tentang mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan yang menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis, sebagai contoh teori control dan social learning theory.

¹⁶ *Ibid.* Hal 43-46.

3. Bridging theories

Menjelaskan struktur social dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat, sebagai contoh : teori subkultur dan teori *differential opportunity*.

Dalam salah satu kesimpulan dari Mulyana W. Kusuma bahwa :

- a) Mengenai jenis kejahatan dengan kekerasan, diidentifikasi 6 jenis, yaitu: pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pemerasan, dan sebagainya.
- b) Model kejahatan dengan kekerasan yang menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor (ranmor, istilah kepolisiannya dan Pemerasan serta penculikan.
- c) Usia pelaku terbanyak bervariasi antara usia serendah-rendahnya 15 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun, dengan catatan, usia antara 15-24 merupakan mayoritas.¹⁷

3. Teori Kontrol Sosial Dan Containment

Teori yang membahas tentang ihwal pengendalian tingkah laku manusia, yang menunjuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu : struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan.

Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari control social didalam menjelaskan kenakalan anak atau remaja. Ketiga komponen tersebut adalah

¹⁷ *Ibid.* hal 64-65

1. Kurangnya control internal yang wajar selama masa anak-anak.
2. Hilangnya control tersebut.
3. Tidak adanya norma-norma dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat).¹⁸

4. Aliran Kriminologi Klasik

Aliran pemikiran ini mendasarkan pandangan bahwa intelegensia dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Intelegensia membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya. Ini merupakan kerangka pemikiran dari semua pemikiran klasik, seperti dalam filsafat, psikologi, politik, hukum dan ekonomi. Dalam konsep tersebut maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendaknya. Kunci kemajuan menurut pemikiran ini adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol dirinya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Di dalam kerangka pemikiran ini, lazimnya kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang.¹⁹

Aliran klasik merupakan label umum untuk sekelompok pemikir tentang kejahatan dan hukuman pada abad 18 dan awal abad 19. Anggota

¹⁸ *Ibid.* Hal : 31-32.

¹⁹ I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 6

paling menonjol dari kelompok pemikir tersebut antara lain Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Dua pemikir ini mempunyai gagasan yang sama, bahwa perilaku kriminal bersumber dari sifat dasar manusia sebagai makhluk hedonistik sekaligus rasional. Hedonistik karena manusia cenderung bertindak demi kepentingan diri sendiri. Sedangkan rasional, karena mampu memperhitungkan untung rugi dari perbuatan tersebut bagi dirinya.²⁰

Dasar dari tindakan individu yang hedonistik adalah kepentingan diri sendiri. Seperti dikatakan Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah kendali dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua hal itulah manusia bergumul tentang apa yang sebaiknya dilakukan, dan apa yang mesti dilakukan. Dua hal itu juga menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita pikirkan.²¹

Menurut Bentham, seluruh tindak tanduk manusia disadari ataupun tidak, sesungguhnya tertuju untuk meraih kebahagiaan itu.²² Apa Yang cocok digunakan, atau cocok untuk kepentingan individu adalah apa yang cenderung untuk memperbanyak kebahagiaan. Demikian juga, apa yang cocok untuk kepentingan masyarakat, adalah apa yang cenderung menambah kesenangan individu-individu yang merupakan anggota masyarakat itu. Orang-orang biasanya akan bertindak untuk keuntungan diri sendiri, dan akan berusaha meminimalkan rasa sakit atau biaya. Inilah yang mesti menjadi titik tolak dalam menata hidup manusia, termasuk hukum.

²⁰ Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, hlm 65

²¹ *Ibid*, lihat juga dalam Bernard L. Tanya, et al, 2011, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

²² Indah Sri Utari, *Op.Cit.*, hlm 66

Menurut aliran klasik ini, seorang individu tidak hanya hedonis tetapi juga rasional, dan dengan demikian selalu mengkalkulasikan untung rugi dari tiap perbuatannya, termasuk ketika melakukan kejahatan. Kemampuan ini memberikan mereka tingkat kebebasan tertentu dalam memilih tindakan yang akan diambil apakah melakukan kejahatan atau tidak.

5. Aliran Kriminologi Positif

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti, manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologisnya dan stuais kulturalnya.²³

Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Aliran pemikiran positif ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu determinis biologis yang menganggap organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dan warisan biologis. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosial kultural yang melingkupinya.²⁴

Aliran positif dalam kriminologi memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya baik yang berupa faktor biologis maupun kultural yang dapat mempengaruhi manusia untuk berbuat

²³ I.S. Susanto, *Op.Cit.*, hlm 7

²⁴ *Ibid*

sesuatu di luar kuasanya. Artinya manusia dipandang tidak memiliki kebebasan untuk mengikuti dorongan keinginannya dan intelegensinya dalam menentukan pilihan untuk berbuat sesuatu secara rasional sebagaimana dikonsepsikan dalam aliran klasik. Sebaliknya, menurut aliran positif, manusia dipandang sebagai makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh berbagai faktor di luar dirinya yang berupa perangkat biologis, psikologis, situasi kultural dalam berbuat sesuatu, baik yang berupa kebaikan maupun kejahatan.²⁵

Penjelasan selanjutnya oleh Indah Sri Utari bahwa ada tiga segmen teori dalam aliran positif.²⁶ Pertama segmen yang bersifat biologis seperti pemikiran Lambrosian mengenai ciri fisik penjahat. Kedua segmen yang bersifat psikologis seperti antara lain pemikiran Hans Eysenck tentang *Psychological Factors* antara lain *neuroticism*, *psychoticism*, *psychopatic* yang menyebabkan seseorang cenderung melakukan kejahatan. Ketiga, segmen *Social Positivism* seperti terdapat dalam pemikiran Adolphe Quetelet, Rawson, Henry Mayhew, dan Durkheim mengenai *sosietal factors* antara lain *Poverty*, *membership of subcultures*, *low level of education*, *crowded cities*, *distribution of wealth* sebagai faktor pendorong terjadinya kejahatan.

Bagi aliran positif, semua faktor-faktor tersebut merupakan unsur utama yang mempengaruhi perbuatan seseorang. Oleh karena itulah, apabila di dapati fenomena kejahatan yang dilakukan seseorang, maka menurut aliran ini, terjadinya kejahatan tersebut dikaenakan pelaku kejahatan mendapat pengaruh dari faktor-faktor tertentu, antara lainnya faktor kemiskinan,

²⁵ Indah Sri Utari, *Op.Cit.*, hlm 71-72

²⁶*Ibid*

rendahnya tingkat pendidikan dan kesempatan, penyakit moral, pengangguran dan kesempatan yang minim.

Menurut Romli, aliran positif yang dipelopori para ilmuwan lebih mengutamakan keunggulan ilmu pengetahuan yang berkembang dari kenyataan hidup dalam masyarakat.²⁷ Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa para ilmuwan ini tidak cukup puas hanya dengan berpikir untuk meningkatkan dan memodernisasi peradaban masyarakat, tetapi mereka lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat.

6. Teori Kriminologi tentang Sebab-Sebab Kejahatan

a. Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (*biologis criminal*)

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall (1758-1828), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dan tingkah laku. Mereka berdasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal, yang berdasarkan pada preposisi dasar :

- 1) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak.
- 2) Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan
- 3) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

b. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari factor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal).

²⁷ Romlli Atmasasmita, *Loc.Cit.*

Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari factor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivistis pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan pada anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang –orang yang bukan penjahat, dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensi yang rendah.²⁸

- c. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari factor sosiologi kultural (sosiologi kriminal)

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karna hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.²⁹

D. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non-Penal

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief³⁰ upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment /mass media*).

²⁸ I.S, Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, Hal : 56.

²⁹ *Ibid*, hal : 72.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, 1996, Hal : 48.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana) dan jalur penal (hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan. kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Usaha-usaha non-penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya.

Usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung

mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Menurut Gene Kassebaurn dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief³¹ penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.

Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief,³² tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal : 149.

³² *Ibid*, Hal : 152.

- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi ter hukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto³³, apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif³⁴ adalah Pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat, mencapai keseimbangan.

E. Konsep Kejahatan Begal dan kriminologis terhadap kejahatan

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³⁵

³³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, yayasan Sudarto, Semarang, Hal : 104.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, Hal : 157.

³⁵ *ibid*, Hal : 25.

Tindak pidana pencurian disertai kekerasan pada dasarnya identic sekali dengan tindak pidana pembegalan atau perampokan. Hal ini berkaitan dengan tindak pidana pembegalan atau perampokan. Hal ini berkaitan dengan cara pengambilan harta itu sendiri, yaitu dilakukan dengan cara terang-terangan dan menggunakan unsur kekerasan didalamnya.³⁶

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditinjau dari hukum positif terdapat beberapa literatur, salah satunya adalah R. Soesilo,³⁷ menyebutkan dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau termasuk yang sedang berjalan.
 - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c) Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

³⁶ Djazuli, 1992, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal : 86.

³⁷ R. Soesilo, 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, Hal : 30.

- d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan mati maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.³⁸

Pada ayat pertama pasal 365 KUHP sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah Sembilan tahun penjara, apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Pada ayat kedua sanksi yang dijatuhkan yaitu dua belas tahun penjara bila perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau termasuk yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, pakaian jabatan palsu dan perintah palsu serta kejahatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat. Ayat ketiga sanksi yang dijatuhkan yaitu lima belas tahun penjara.³⁹

³⁸ *Ibid.* hal : 253-254

³⁹ *Ibid.* Hal : 254